

SALINAN

KEPUTUSAN

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

NOMOR 234 TAHUN 2022

TENTANG

**TIM PENYUSUN NASKAH AKADEMIK DAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG
TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PUBLIK**

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan penyusunan Rancangan Undang-Undang mengenai Pengadaan Barang/Jasa Publik, perlu menyusun Naskah Akademik sebagaimana ketentuan dalam Pasal 43 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan beserta perubahannya dan ketentuan Pasal 8 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan beserta perubahannya;
- b. bahwa untuk melaksanakan penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang mengenai Pengadaan Barang/Jasa Publik sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Penyusun Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang tentang Pengadaan Barang/Jasa Publik;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Tim Penyusun Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang tentang Pengadaan Barang/Jasa Publik;

- Mengingat :
1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 144);
 2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
 3. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 77);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG TIM PENYUSUN NASKAH AKADEMIK DAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PUBLIK.

- KESATU : Menetapkan Tim Penyusun Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang tentang Pengadaan Barang/Jasa Publik yang terdiri dari Pengarah, Ketua, Wakil Ketua dan Anggota dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab:
1. melakukan rapat dan diskusi di dalam Kantor LKPP serta *Focus Group Discussion/Konsinyering* secara daring ataupun luring;
 2. melakukan analisis dalam pengambilan keputusan;
 3. menyusun Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Pengadaan Barang/Jasa Publik;
 4. menyusun Naskah Rancangan Undang-Undang tentang Pengadaan Barang/Jasa Publik;
 5. melakukan koordinasi pemantapan dan penyelarasan Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang tentang Pengadaan Barang/Jasa Publik;
 6. melakukan koordinasi dengan pemangku kepentingan dan *stakeholder* terdampak; dan
 7. melakukan koordinasi dengan dalam menjalankan tugasnya.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, Tim Penyusun melakukan koordinasi dan konsultasi dan melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- KEEMPAT : Masa kerja Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah sejak Keputusan ini ditetapkan hingga penyelenggaraan kegiatan dinyatakan selesai.

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Desember 2022

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd

HENDRAR PRIHADI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan
Sumber Daya Manusia LKPP,



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG TIM PENYUSUN NASKAH AKADEMIK DAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PUBLIK

NOMOR : 234 TAHUN 2022

TANGGAL : 5 DESEMBER 2022

SUSUNAN TIM PENYUSUN NASKAH AKADEMIK DAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG
TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PUBLIK

UNIT ESELON 1 & ESELON 2 Mandiri		SEKRETARIS UTAMA	DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN STRATEGI DAN KEBIJAKAN	DEPUTI BIDANG TRANSFORMASI PENGADAAN DIGITAL	DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA	DEPUTI BIDANG HUKUM DAN PENYELESAIAN SANGGAH
NAMA KLUSTER		KLASTER PEMBINAAN	KLASTER UMUM	KLASTER TRANSFORMASI DIGITAL	KLASTER USAHA MIKRO KECIL	KLASTER PENGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI
Pengarah	Kepala LKPP	Sekretaris Utama	Deputi Bidang Pengembangan Strategi Dan Kebijakan	Deputi Bidang Transformasi Pengadaan Digital	Deputi Bidang Pengembangan Dan Pembinaan Sumber Daya Manusia	Deputi Bidang Hukum Dan Penyelesaian Sanggah
Ketua		Kepala Biro Hukum, Organisasi dan Sumber Daya Manusia	Direktur Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum	Direktur Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	Direktur Pengembangan Profesi dan Kelembagaan	Direktur Advokasi Pemerintah Pusat
Wakil Ketua		<ol style="list-style-type: none"> Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Sistem Informasi, dan Umum 	<ol style="list-style-type: none"> Direktur Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Khusus Direktur Pengembangan Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional 	<ol style="list-style-type: none"> Direktur Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Pengadaan Direktur Pengembangan Sistem Katalog 	<ol style="list-style-type: none"> Direktur Sertifikasi Profesi Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa 	<ol style="list-style-type: none"> Direktur Advokasi Pemerintah Daerah Direktur Penanganan Permasalahan Hukum

UNIT ESELON 1 & ESELON 2 Mandiri	SEKRETARIS UTAMA	DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN STRATEGI DAN KEBIJAKAN	DEPUTI BIDANG TRANSFORMASI PENGADAAN DIGITAL	DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA	DEPUTI BIDANG HUKUM DAN PENYELESAIAN SANGGAH
NAMA KLUSTER	KLASTER PEMBINAAN	KLASTER UMUM	KLASTER TRANSFORMASI DIGITAL	KLASTER USAHA MIKRO KECIL	KLASTER PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI
Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum	Eva Sinaga	1. Rusli Maryadi 2. Deasy Rachmawati 3. Octo Army 4. Lailatul Mufarokhah 5. Andy Purwa Sejati 6. Yasmine Permata Sari 7. Fairuz Nawfal Hamid 8. Dedi Setiawan	1. Octo Army 2. Andi Darmawan	1. Ilvia Restu Utami 2. Fenita Enggraini	1. Antonius Lambok Sihombing 2. Andi Rannualdi
Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Khusus	1. Tino Yuka A 2. Larasati Aisyah Retno Anjani	1. Firmansyah 2. Hima Tussafinah 3. Puteri Rengganis 4. Frama Nugraha 5. Lingga Sakti	Thanthawi Jauhari	1. Dwi Satrianto 2. Moch. Syamsul Alamsyah	1. Zulhenny 2. Rizki Arif Sudrajat 3. Oktrita Purwantari Rahayu 4. Mario Duwi Cahyo
Direktorat Iklim Usaha dan Kerja Sama Internasional	1. Anita Carollin 2. Eristya Dessy Astarina	1. Theodore Sutarto 2. Syukri	1. Sri Aditya Nur Pratama 2. Rahmat Fitriadi Herman	1. Yuyu Yulianti 2. Ferisa Rahmani 3. Sofie Maghfira	1. Gigih Pribadi 2. Widya Prima Sari Fultanegara 3. Hajeng Hayu Wandhira
Direktorat Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Pengadaan	Andy Martanto	1. Heldi Yudiyatna 2. Muhammad Qadr Siddiq Zam	1. Mustika Rosalina Putri 2. Ikbal Amaludin	Wening Dyah Capriani Hapsari Dewi	Dara Kumala Arum Buana
Direktorat Pengembangan Sistem Katalog		Hilman Fazri	Andri Priyo Utomo	1. Ari Sulindra 2. Mega Candra Sera	Erlangga Aninditya
Direktorat Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	Sugianto	Mahsa Elvina Rahmawyanet	Fajar Adi Hemawan	Rizky Dwi Raharjo	-
Direktorat Pengembangan Profesi dan Kelembagaan	Januar Indra	-	-	Rovazio Okiiza	-

UNIT ESELON 1 & ESELON 2 Mandiri	SEKRETARIS UTAMA	DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN STRATEGI DAN KEBIJAKAN	DEPUTI BIDANG TRANSFORMASI PENGADAAN DIGITAL	DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA	DEPUTI BIDANG HUKUM DAN PENYELESAIAN SANGGAH
NAMA KLUSTER	KLASTER PEMBINAAN	KLASTER UMUM	KLASTER TRANSFORMASI DIGITAL	KLASTER USAHA MIKRO KECIL	KLASTER PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI
Direktorat Sertifikasi Profesi	Adreng Kusuma Ayuningtyas	Umi Nurnaeni	Muhammad Ardian Wibowo	-	Yohana Surat Payon Philips
Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa	1. Tatang Rustandar Wiraatmadja 2. Tri Susanto	-	-	Muhammad Firdaus	-
Direktorat Advokasi Pemerintah Pusat	1. Seno Haryo Wibowo 2. Clara Novia 3. Abdul Gafur Darussalam 4. Arif Hilmi Aziz	1. Muhammad Dwi Sumanto 2. Nida Mufidah Anggraini 3. Desak Putu Ayunda Putri	1. Selamat Budiharto 2. Muhamad Dwi Sumanto 3. Aryandhika Sandya Nugraha 4. Diana Ulfi Jannati	1. Sari Melani 2. Kartika Fitriyani 3. Andi Putri Fathania Nur Ranti Faisal	1. Sari Melani 2. Nuraini Darmastuti 3. Katri Kusuma Adi 4. Joko Budi Sulisty
Direktorat Advokasi Pemerintah Daerah	1. Eko Rinaldo Octavianus 2. Paramitha Agdina Pusparini	1. Ade Rizky Emirsyah 2. Niken Novia Sitaresmi	1. Agung Ismail 2. Niken Mustika Rini	1. Tjipto Prasetyo Nugroho 2. Yustitia Fernando	1. Imam Arumsyah 2. Wuri Setianingrum 3. Diani Bahri Puteri
Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum	Febri Kamalisa Rahman	Safira Rachmadewi	-	-	Arif Budiman
Biro Perencanaan dan Keuangan	1. Edi Kristiyanto 2. Cecep Hendar Supriadi 3. Agita Marelia Ulfa	-	-	-	-
Biro Hukum, Organisasi, dan Sumber Daya Manusia	Ardian Hoppin Sitompul	Asih Riska Nurmasari	1. Rinaldi Morintosh 2. Rasmita Juliana Sitepu 3. Yogie Prastiyans	Benny Leopold Dumais	1. Cherish Shery Desarya
Biro Hubungan Masyarakat, Sistem Informasi, dan Umum	1. Himawan Giri 2. Desi Kartika	Anindita Widya Sismiati	Tito Sulisty	1. Rini Handriyani 2. Meylina Putri Fibisari	1. Eva Sari Dewi 2. Intan Dana Lestari
Inspektorat	Angga Widita Amirul	-	-	-	Estu Retno Yulianti
Sekretariat	1. Renti Dwiyanti Septiana 2. Dini Lestari				

UNIT ESELON 1 & ESELON 2 Mandiri	SEKRETARIS UTAMA	DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN STRATEGI DAN KEBIJAKAN	DEPUTI BIDANG TRANSFORMASI PENGADAAN DIGITAL	DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA	DEPUTI BIDANG HUKUM DAN PENYELESAIAN SANGGAH
NAMA KLUSTER	KLASTER PEMBINAAN	KLASTER UMUM	KLASTER TRANSFORMASI DIGITAL	KLASTER USAHA MIKRO KECIL	KLASTER PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI
	3. Anggraini Dwi Hapsari 4. Maharani Prima Wijayanti 5. Dandy Darmawan 6. Monica Hermala 7. Erwinsyah Negara 8. Manuela Devega 9. Firyal Iqbal Zharfan Rais 10. Mahatmya Widyasri 11. Stefanus Karmel Nugraha Kopong Miten				

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd

HENDRAR PRIHADI